

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan dan berbagai isu terkait ketidakmampuan mengelola keuangan menjadi semakin menyadarkan akan pentingnya literasi keuangan. Di beberapa negara, literasi keuangan bahkan telah dicanangkan sebagai program nasional agar masyarakat melek keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara. Begitupun di Indonesia yang mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) terus mengupayakan perluasan akses keuangan masyarakat melalui pelaksanaan Bulan Inklusi keuangan (BIK) 2021.

Indonesia merupakan negara yang menganggap literasi keuangan sangatlah penting karena, lemahnya regulasi dan rendahnya pengetahuan akan literasi keuangan masyarakat menyebabkan berbagai jenis penipuan investasi yang merugikan konsumen, seperti investasi Raihan Jewellery dalam bentuk kontrak berjangka kuasi-emas. Raihan Jewellery berhasil mendapatkan dana masyarakat yang besar, yaitu Rp 13,2 triliun dari penjualan 2,2 juta ton emas dan menjanjikan *cashback* 1,5%, 2% setiap bulan selama masa kontrak, namun karena perilaku bisnis yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab ini, pada akhirnya investor kehilangan seluruh investasinya. Dengan pendidikan yang baik dan edukasi yang benar maka tidak ada bisnis yang harus menyebabkan kerugian dan kemiskinan di masyarakat. Roestanto (2017, hlm. 9)

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang baik, dengan melihat konsekuensi yang diterima untuk memperoleh dan mengevaluasi informasi yang biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dan melaksanakan perencanaan keuangan. Sari (2019, hlm. 1)

Chen dan Volpe (1998) dalam Yuwono et al. (2018, hlm. 410) menyatakan bahwa literasi keuangan sebagai pengetahuan untuk mengelola keuangan ketika membuat keputusan keuangan. Chen dan Volpe mengatakan bahwa pengetahuan instrumen keuangan yang ada di lembaga keuangan seperti tabungan bank, asuransi dan investasi dalam proses final individu sebagai kontrol atas keuangan rumah tangga akan sangat menentukan pilihan dan jumlah manfaat yang terjadi di masyarakat.

Menurut Xiu & Zia dalam Hidajat (2016, hlm. 2) menjelaskan mengenai literasi keuangan sebagai berikut :

Beberapa survey untuk mengukur tingkat literasi keuangan dengan menggunakan seperangkat pertanyaan tentang tingkat suku bunga majemuk, inflasi dan diversifikasi risiko dari (Lusardi & Mitchell, 2011c) yang dilakukan di beberapa negara *high-income*, *upper-middle-income* dan *lower-middle-income* memang menunjukkan bahwa masih terdapat tingkat literasi keuangan yang rendah di negara negara *high-income* dan sangat rendah di negara-negara *upper-middle-income* dan *lower-middle-income*.

Menurut Sari (2019, hlm. 1) mengatakan bahwa literasi keuangan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dan melakukan perencanaan terhadap keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perencanaan keuangan adalah tentang bagaimana menjalani hidup hari ini yang sederhana sesuai dengan kemampuan keuangan dan sementara itu mempersiapkan masa depan yang sejahtera. Ketidapahaman akan pentingnya literasi keuangan dapat mengakibatkan kurangnya akses kelembaga keuangan sehingga mudah dipengaruhi oleh penjual produk keuangan, hal tersebut tentunya dapat menghambat dalam pembangunan ekonomi negara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan berbagai program dalam pencapaian akses pada industri keuangan melalui peluncuran Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLKI). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016

yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8% (OJK, 2018). Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%.

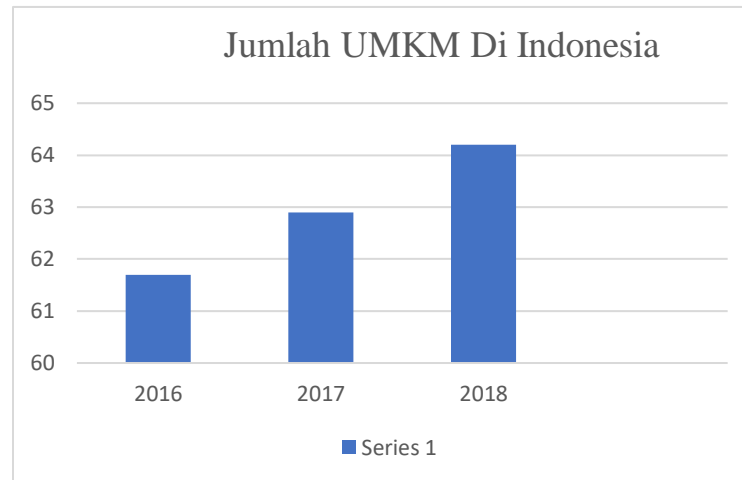
Survei SNLIK OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Pada siaran pers bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan. Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPK) menyelenggarakan acara Literasi Keuangan Indonesia. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan sejalan dengan terus bertambahnya jumlah investor individu yang membeli berbagai instrumen investasi keuangan. Seperti jumlah investor di pasar modal yang meningkat menjadi 5,60 juta (96% yoy) pada Juni 2021 dan didominasi oleh investor ritel terutama kalangan milenial yang mencapai 70% (Bank Indonesia, 2021).

Pemahaman literasi keuangan sangat diperlukan bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM, agar UMKM mampu membuat pilihan dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya, memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik, dan menghindari investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Literasi keuangan juga membantu UMKM menghindari penipuan penawaran pembiayaan OECD (2016) dalam Sari (2019, hlm. 2). Di sisi lain, UMKM dengan tingkat literasi keuangan yang rendah seringkali mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan tentang sumber pendanaan dan tidak siap untuk menangani potensi permintaan pembiayaan atau menegosiasikan persyaratan pembiayaan.

Menurut penelitian terdahulu Anggraeni (2015) terhadap UKM Deborah menunjukkan bahwa, tingkat literasi keuangan rendah mempengaruhi kemampuan pemilik usaha untuk mengelola keuangan bisnis dengan kemampuan yang hanya

sebatas pencatatan tetapi tidak ada dokumentasi pemasukan dan pengeluaran yang baik. Mirip dengan temuan Ida dan Dwinta (2010), mereka menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan mempengaruhi perilaku manajemen keuangan seseorang. Berdasarkan fenomena di atas, penulis melihat peluang bahwa penelitian ini masih relevan untuk dilakukan. (Rumbianingrum & Wijangka, 2018)

Di Indonesia, UMKM tidak dapat dikesampingkan sebagai tulang punggung perekonomian negara, karena UMKM memiliki daya serap yang lebih tinggi dibandingkan jenis usaha lainnya. Terjadi krisis ekonomi yang cukup besar pada tahun 1998, terbukti dengan krisis global tahun 2007-2008, dimana sektor yang bertahan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan data UMKM dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 1. 1
Jumlah UMKM Indonesia
Sumber: (Christy, 2021)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa umlah UMKM di Indonesia semakin meningkat dari pada setiap tahunnya, dan tidak menutup kemungkinan angka ini akan bertambah tiap tahunnya.

Di Indonesia, UMKM masih menghadapi berbagai pertanyaan klasik atau menengah atau lanjutan. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya, serta lintas sektor atau perusahaan dalam sektor yang sama. Namun, semua UMKM menghadapi beberapa masalah umum. Meskipun perkembangan UKM mengalami peningkatan secara kuantitas, namun kualitas

UKM belum ditingkatkan secara merata. Masalah klasik yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh permasalahan internal yang dihadapi UMKM, yaitu: rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM baik dari segi manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran, lemahnya jiwa wirausaha peserta UMKM, dan Usaha Mikro. memiliki keterbatasan akses permodalan, informasi, dan teknologi. dan pasar, dan faktor produksi lainnya. Ginanjar & Ratmoko (2016, hlm. 105)

Berdasarkan data BPS (2019) bahwa PDB per kapita selama periode 10 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Namun, hasil SNLIK tahun 2019 menunjukkan tingkat pengetahuan keuangan (literasi keuangan) masyarakat sebesar 38,03%, artinya baru sekitar sepertiga penduduk Indonesia yang teredukasi dengan baik (*well literate*) soal keuangan. Di sisi lain tingkat inklusi keuangan sebesar 76,19%, dan masih didominasi oleh penggunaan produk dan jasa keuangan sektor perbankan. Peningkatan pendapatan masyarakat belum diikuti oleh pola pengelolaan keuangan yang baik. Menurut data BPS, selama 11 tahun sejak 2003, keinginan masyarakat untuk menabung akibat peningkatan pendapatan (*marginal propensity to save*) cenderung menurun, sebaliknya dalam periode yang sama keinginan masyarakat untuk konsumsi (*marginal propensity to consume*) cenderung meningkat.

Tabel 1. 1
SLNIK

| No. | Tujuan Keuangan | Persentase |
|-----|--|------------|
| 1. | Mempersiapkan hari tua | 39,50% |
| 2. | Membayar biaya pendidikan | 25,71% |
| 3. | Sekedar memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari | 20,68% |
| 4. | Kekadar mempertahankan hidup | 4,68% |
| 5. | Membeli rumah | 4,29% |
| 6. | Memenuhi biaya kesehatan | 3,08% |
| 7. | Membayar hutang | 1,82% |

Sumber : (Laporan Tahunan OJK, 2020)

Berdasarkan SNLIK 2019 di atas responden memilih persiapan hari tua dengan angka 39,50% juga biaya pendidikan 25,71% dan memilih kebutuhan pokok sehari hari sebesar 20,68%, dapat di artikan bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia sudah mulai memilih pengelolaan keuangan jangka panjang, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari saja.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan di Jawa Barat telah meningkat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi di Jawa Barat sebesar 88,48%, meningkat dari survei tahun 2016 sebesar 71,4%. Sementara itu, tingkat melek huruf adalah 37,43%, naik dari 33% pada survei 2016. "Dari target tingkat inklusi 75% dan literasi keuangan sebesar 35% di akhir tahun 2019 telah tercapai," ujar Kepala OJK Regional 2 Jabar Triana Gunawan, saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jabar Semester-2 Tahun 2019, di Bandung. (Kusumaningrum, 2019, hlm. 111)

Literasi keuangan menjadi aspek penting bagi investor ritel yang menjadi *follower* di pasar modal sehingga dapat melindungi investor dari investasi ilegal dan memitigasi investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek

yang tinggi tanpa mempertimbangkan risiko, aspek legalitas produk serta aspek kewajaran penawaran.

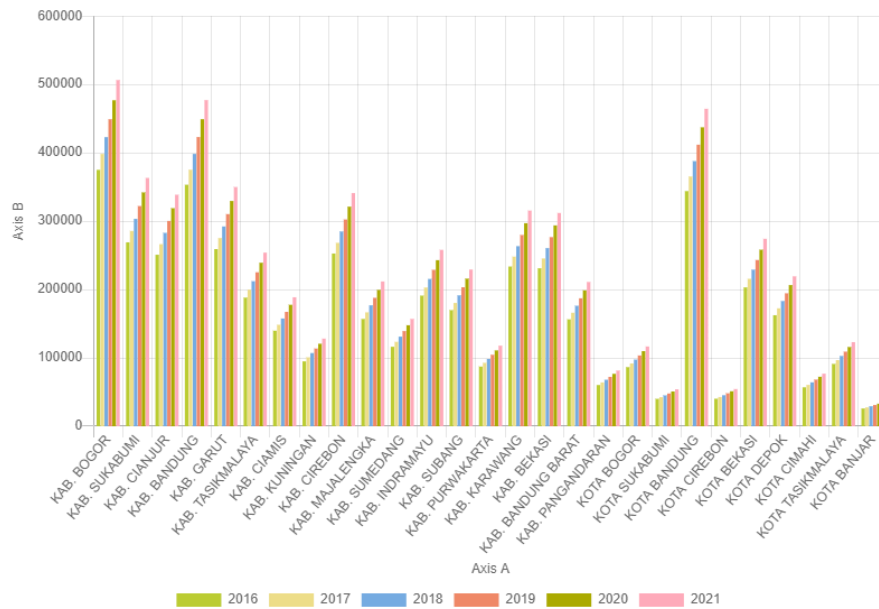
“Literasi keuangan yang rendah merupakan persoalan yang serius karena dapat memberikan dampak yang negatif terhadap perilaku keuangan. Seseorang atau keluarga yang tidak *literate* cenderung tidak merencanakan program pensiun” (Rooij dkk, 2011) dalam (Hidajat, 2016, hlm. 5) , meskipun tingkat literasi keuangan yang rendah tidak hanya berdampak negatif pada kondisi keuangan, tetapi juga mengekspos risiko keuangan pada risiko yang lebih besar akibat lahirnya mekanisme dan produk keuangan baru serta turunannya (*derivatif*) yang semakin kompleks.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terus membaik pada triwulan I 2021, dengan mencatat kontraksi kecil menjadi -0,83% (y/y) dari -2,39% (yoy) pada triwulan IV 2020. Perbaikan ini sejalan dengan perekonomian nasional yang juga mengalami kontraksi - 0,74% (*year-on-year*). Di dalam negeri, perbaikan perekonomian bersumber dari peningkatan konsumsi rumah tangga dari triwulan sebelumnya sejalan dengan membaiknya kegiatan ekonomi yang turut mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. (Bank Indonesia , 2021).

Di Jawa Barat pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 4,5 juta usaha atau 98,84 persen dari total usaha nonpertanian di Jawa Barat. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Jawa Barat lebih dari 9,7 juta orang atau sekitar 74,07 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia termasuk Jawa Barat pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuhan. UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Barat. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usahayang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan

masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan.

Persentase UMK di Jawa Barat mencapai 98,84 persen dari total jumlah usaha nonpertanian di Jawa Barat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 2,1 juta usaha atau mencapai 47,44 persen. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing masing sejumlah 860.312 usaha (18,93 persen) dan lebih 600.720 usaha (lebih dari 13,12 persen). Konsentrasi UMK tersebar pada masing masing kabupaten/kota di Jawa Barat. Terdapat tiga kabupaten/kota yang persentase UMK-nya lebih dari 7 persen terhadap total UMK Jawa Barat. Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung memiliki kontribusi sebesar 22,99 persen total UMK Jawa Barat. (Statistik, 2018). Berikut data UMKM di Jawa Barat:



Gambar 1.2
UMKM Jawa Barat
 Sumber : (Statistik, 2018)

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu masalah utama dalam UMKM karena jika pengelolaan keuangan dalam UMKM tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat kinerja dan mendapatkan akses pembiayaan. (Rumbianingrum, & Wijangka, 2018, hlm. 157). Hambatan bagi UKM Dalam penerapan pengelolaan keuangan, menurut Elizabet (2020) dalam (Harto et al., 2021) antara lain: segi kompetensi antara lain latar belakang pendidikan kurang memadai, belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi, dari segi pelaku usaha belum diperlukan penerapan akuntansi,

Menurut Ginanjar & Ratmoko (2016, hlm. 112) mengatakan bahwa setiap bisnis ada pasang surutnya keuntungan dan kerugian di sepanjang jalan. Faktor pendukung dan disinsentif juga menjadi salah satu indikator kemunduran atau kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Bandung Barat, yaitu keterbatasan modal kerja dan/atau modal investasi, sulitnya memperoleh bahan baku yang berkualitas dan terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia (terutama manajemen dan teknisi produksi), khususnya adalah informasi tentang kesulitan pemasaran dan pemasaran (termasuk teknisi manajemen dan distribusi).

Menurut narasumber penelitian pada salah satu UMKM bidang pangan mengatakan bahwa, pengelolaan keuangan mereka masih dilakukan secara manual dan yang mengelola keuangan masih merangkap tugas juga, dimana pengelolaan keuangannya dicatat hanya yang umum-umum saja seperti pemasukan barang, pembelian, pengeluarann, dan kadang tercampur dengan dana milik pribadi sehingga kadang akan kerepotan dalam perhitungan laba karena adanya uang yang tercampur. (Ira, 2021). Hal tersebut bisa dikatakan bahwa masih kurangnya disiplin UMKM dalam pengelolaan keuangan, yang mana persoalan dalam keterampilan pengelolaan keuangan menjadi masalah tersendiri bagi UMKM karena UMKM akan kesulitan dalam melakukan pengembangan usaha mereka. Hal ini sejalan dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara kepada salah satu komoditi UMKM mengatakan bahwa kurangnya

keterampilan dalam pengelolaan keuangan menjadi permasalahan yang sering di alami oleh komoditi UMKM tersebut dimana mereka kurang terampil dalam segi perencanaan dan pengelolaan dana yang mana hasilnya keuangan UMKM tersebut menjadi tidak terkontrol.

Barulah hal ini pun terjadi akibat kurangnya pengetahuan akan literasi keuangan, sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rumbianingrum & Wijangka (2018) pada obyek penelitian UMKM KYU DT menghasilkan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah mempengaruhi pemilik usaha dalam mengelola keuangan usaha. Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis menganggap hal ini masih relevan untuk diteliti apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan terutama pada komoditas UMKM Kabupaten Bandung Barat, sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan Pada Pengelolaan Keuangan UMKM Kabupaten Bandung Barat”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Kurangnya disiplin UMKM dalam pencatatan keuangan serta kurang memahami cara pengelolaan keuangan dengan benar dan tingkat literasi keuangan yang masih rendah

C. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas tidak semua permasalahan akan diteliti karena keterbatasan dari peneliti, oleh karena itu batasan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung Barat pada trimester ke-2 tahun anggaran 2022
- b. Literasi keuangan membatasi pada empat aspek literasi keuangan
- c. Pengelolaan keuangan membatasi perilaku manajemen keuangan
- d. UMKM membatasi pada UMKM sektor perdagangan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat?
- 2) Bagaimana pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat ?
- 3) Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Bandung Barat ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana literasi keuangan pada pelaku UMKM di KBB
2. Bagaimana pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di KBB
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di KBB

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis untuk:

1. Akademis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada publik dan pemerintah dalam mendukung kebijakan serta menjadi referensi dan tambahan ilmu dalam melakukan penelitian

2. UMKM

Sebagai bentuk tambahan wawasan literasi keuangan bagi pelaku UMKM bagaimana pengelolaan keuangan dengan baik dan

3. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi penulis akan pentingnya literasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik.

F. Definisi Operasional

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Literasi Keuangan

Menurut (Huston 2010 dalam Sabilla & Wijayangka, 2019, hlm. 147) mendefinisikan literasi keuangan sebagai berikut:

Literasi keuangan adalah sebagai kumpulan pengetahuan keuangan beserta implementasinya melalui bentuk keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun lingkup dari pengetahuan keuangan hanya terbatas pada pengetahuan individu mengenai cara penggunaan produk keuangan yang diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman pribadi. Sedangkan dimensi aplikasi dari literasi keuangan adalah kemampuan individu yang dilandasi kepercayaan dirinya dalam menggunakan pengetahuan keuangannya untuk menggunakan produk keuangan dengan baik.

a. Dimensi Pengetahuan Dimensi literasi keuangan sebagai kumpulan pengetahuan keuangan beserta implementasinya melalui bentuk keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun lingkup dari pengetahuan keuangan hanya terbatas pada pengetahuan individu mengenai cara penggunaan produk keuangan yang diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman pribadi.

b. Dimensi Aplikasi Sedangkan dimensi aplikasi dari literasi keuangan adalah kemampuan individu yang dilandasi kepercayaan dirinya dalam menggunakan pengetahuan keuangannya untuk menggunakan produk keuangan dengan baik.

2. Pengelolaan keuangan

Menurut Horne dalam Kasmir (2010:5) dalam Rumbianingrum & Wijangka (2018, hlm. 158) mendefinisikan manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan adalah “segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh”. Bambang Riyanto dalam Mulyawan (2015:31) mendefinisikan manajemen keuangan adalah keseluruhan dari aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana.

G. Sistematika Skripsi

Susunan sistematika dalam penulisan tentang pengaruh literasi keuangan pada pelaku umkm peneliti uraikan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sesuai judul skripsi ini.

BAB II : Berisikan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka berfikir yang berisi tentang pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan umkm di bandung

BAB III : adalah metode penelitian yang menggambarkan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Desain penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, definisi operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik penguykuran, pengujian instrumen dan teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat deskripsi objek penelitian, serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. pada bab ini akan memaparkan objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil data dalam penelitian yang dilakukan.

BAB V : Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran yang diberikan bagi penelitian selanjutny